

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Indonesia merupakan sebuah negara yang berada dikawasan Asia Tenggara yang memiliki wilayah yang luas serta mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak. Keadaan geografi dan demografi Indonesia sebagai negara terbesar diantara negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kepulauan terdiri dari 13.667 pulau-pulau dan gugusan pulau besar dan kecil.¹

Indonesia sebagai suatu negara yang terdiri dari ribuan pulau-pulau besar dan kecil, dan mempunyai wilayah perairan yang dikelilingi oleh samudra-samudra yang luas, yaitu Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik, dan juga diapit oleh dua benua, yaitu Australia dan Asia..

Sebagai salah satu negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga menjadi salah satu negara pencetus berdirinya *Association of South East Asian Nation* atau perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, Indonesia menandatangani Deklarasi ASEAN yang disebut juga sebagai Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Deklarasi ini salah satunya menyebutkan bahwa ASEAN merupakan suatu himpunan untuk kerja sama regional di antara

negara-negara Asia Tenggara.² Wujud kerja sama itu antara lain berupa *ASEAN Free Trade Area* atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA).

Tujuan suatu negara bisa berupa politik luar negeri yang dengan nilai-nilai, tujuan negara itu. Hans Margenthau menganggap kekuatan ekonomi yang terdiri dari beberapa elemen yang menentukan besar kecilnya kekuatan suatu negara. Elemen elemen yang dimaksud oleh Margenthau dan dimiliki oleh Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Letak geografis Indonesia yang berada didaerah strategis
- 2) Sumber daya alam
- 3) National character
- 4) National moral atau semangat nasionalis
- 5) Faktor penduduk, baik jumlah penyebaran maupun susunannya.
- 6) The quality of diplomacy atau mutu diplomasi suatu negara.³

Jadi tujuan Indonesia masuk AFTA adalah dalam rangka meraih keuntungan ekonomi, yang dengan kekuatan ekonominya diharapkan mampu mendukung kemampuan politik luar negerinya.

Atas dasar ini maka Indonesia dibawah pemerintahan SBY membutuhkan strategi untuk mengantisipasi lajunya produk-produk luar dalam perdagangan bebas AFTA. Apa lagi mengingat kondisi dan tingkat perekonomian Indonesia masih banyak kelemahan-kelemahan, serta sumberdaya yang ada juga belum

² Lihat Bangkok Declaration 1967

³ Hans J Margenthau, *Politik Antar Bangsa*, Penerjemah A.M.Fatwah, Jakarta; yayasan obor Indonesia, hal 5

digunakan sebagai alat untuk mengetahui dan menilai tingkat di
 atas maka perlu mengadopsi judul : STRATEGI TERPADUAN
 NASIONAL PEMERINTAHAN SBY DALAM MENGHADAPI PASAR
 HIJAS AFTA, Kajian atas Reposisi Indonesia dalam AFTA

B. PENDAHULUAN

Perubahan-perubahan yang terjadi pada perekonomian Indonesia
 dalam beberapa tahun terakhir ini telah menimbulkan perubahan-perubahan
 yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan
 tersebut terutama disebabkan oleh pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan
 dan teknologi yang berkembang pesat. Perubahan-perubahan tersebut
 telah menimbulkan tantangan-tantangan baru bagi bangsa Indonesia
 dalam menghadapi persaingan internasional. Oleh karena itu, pemerintah
 Indonesia perlu merencanakan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan
 yang tepat untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Salah satu
 kebijakan yang perlu diperhatikan adalah kebijakan perdagangan internasional.
 Kebijakan perdagangan internasional yang tepat akan dapat meningkatkan
 pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 Indonesia.

Salah satu kebijakan perdagangan internasional yang perlu diperhatikan
 adalah kebijakan tarif. Kebijakan tarif yang tepat akan dapat melindungi
 industri dalam negeri yang masih muda dan meningkatkan pendapatan
 pemerintah. Kebijakan tarif yang tidak tepat akan dapat merugikan
 industri dalam negeri yang sudah maju dan mengurangi pendapatan
 pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu merencanakan
 dan melaksanakan kebijakan tarif yang tepat untuk menghadapi tantangan-
 tantangan perdagangan internasional.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Perdagangan internasional adalah salah satu dari persoalan ekonomi politik internasional yang paling tua dan paling kontroversial. Perdagangan internasional ditentukan oleh struktur produksi ekonomi politik internasional seperti halnya struktur teknologi dan struktur keamanan internasional. Perdagangan juga menghubungkan satu negara dengan negara lain sehingga meningkatkan saling ketergantungan diantara mereka.

Latar belakang munculnya perdagangan internasional adalah bahwa setiap negara tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan warganya, untuk itu mereka mendatangkan barang dari negara lain. Maka terjadilah transaksi barang atau jasa yang menghubungkan antara negara-negara dimana mereka saling membutuhkan.

Integrasi ekonomi pada umumnya dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan berbagai hambatan perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya diantara negara-negara yang tergabung dalam suatu ikatan kerja sama.⁴

Gagasan pembentukan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) muncul sebagai tanggapan dari perubahan yang terjadi diluar dan didalam ASEAN sendiri. Faktor eksternal yang menjadi penyebabnya adalah situasi usainya perang dingin, ambruknya sistem politik negara-negara komunis Eropa Timur yang disertai peralihan ekonomi mereka dari ekonomi terpimpin ke ekonomi pasar. Dilain

⁴ J. Soedrajat Djiwandono, *perdagangan dan pembangunan: Tantangan, Peluang dan Kebijakan* *Dasar-dasar Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: IDRES, 1992, hal 302

pihak timbul pula kecenderungan baru pembentukan blok-blok perdagangan dibelahan dunia seperti PTE (Pasar Tunggal Eropa) yang disusul kemudian oleh NAFTA (*North American Free Trade Agreement*). Selain itu muncul pula kawasan lain yang berpotensi menarik investasi asing seperti Cina yang tentu bakal menjadi saingan ASEAN secara keseluruhan.

Keputusan pembentukan AFTA merupakan sesuatu yang sangat tepat sekarang ini, terutama untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian dunia yang sedang terseret arus globalisasi dan regionalisasi perekonomian dunia, dan juga untuk memberikan “warna baru” kerjasama ekonomi ASEAN lebih rinci. Adanya Perkembangan dunia dengan pembentukan Pasar Tunggal Eropa dan NAFTA sungguh mengancam dan mengkhawatirkan negara ASEAN. Jika ASEAN tidak segera membentuk kesatuan ekonomi bersama, ditakutkan ASEAN makin tidak bisa bersaing.

AFTA diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi dan dapat lebih meningkatkan daya tarik ASEAN. Dengan menciptakan pasar yang lebih besar diharapkan bahwa ASEAN akan menarik lebih banyak penanam modal asing dan modal dari negara anggota ASEAN sendiri⁵. Bagi Indonesia AFTA bisa dijadikan latihan peningkatan daya saing sebelum mencapai persaingan pasar global. Kerjasama dibidang transportasi, komunikasi, perbankan, dan keuangan pada tingkat regional ASEAN akan memudahkan pengembangan

⁵ Raharjo Djambomo, *Sub Wilayah Ekonomi ASEAN dan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN*, Jakarta: Pusat Kerjasama Antara Negara ASEAN Sekretariat Danu, 1995-1996 hal vii

1957 йил 10 июль куни... (text is mirrored and difficult to read)

1. ... (text is mirrored and difficult to read)

2. ... (text is mirrored and difficult to read)

3. ... (text is mirrored and difficult to read)

4. ... (text is mirrored and difficult to read)

5. ... (text is mirrored and difficult to read)

6. ... (text is mirrored and difficult to read)

7. ... (text is mirrored and difficult to read)

8. ... (text is mirrored and difficult to read)

bisnis di pusat-pusat pertumbuhan. Tetapi suatu proyek kerjasama bidang transportasi dapat dilakukan lebih efektif pada tingkat sub wilayah.⁶

Krisis moneter telah melanda di beberapa negara ASEAN termasuk juga Indonesia. Untuk menata kembali perekonomian membutuhkan waktu yang cukup lama dan bukan suatu hal yang mudah. Apa lagi situasi dan kondisi ekonomi dan politik Indonesia di bawah pemerintahan SBY belum bisa disebut stabil, karena disamping warisan utang luar negeri dari pemerintah orde baru belum terlunasi, disisi yang lain terjadi bencana alam di berbagai daerah. Sehingga ini menimbulkan permasalahan yang lain dari apa yang telah direncanakan.

Kata perubahan ternyata telah menjadi modal sangat kuat bagi SBY-Kalla untuk memperoleh simpati rakyat yang kemudian benar-benar membawa pasangan ini memenangkan pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Sekarang setelah rakyat benar-benar memberikan kepercayaan kepada Presiden/Wakil Presiden baru, apa perubahan yang akan dilakukan, dan apa saja masalah yang akan dihadapi dalam mewujudkannya? Pakar-pakar ekonomi “konvensional” banyak yang menyatakan mustahil SBY-Kalla akan mampu mengadakan perubahan karena pemerintah sekarang, yang telah mewarisi segala kekeliruan strategi pembangunan ekonomi Orde Baru, sebenarnya telah terjebak dalam 2 perangkap yaitu utang luar negeri (dan sekarang ditambah lagi utang dalam negeri). Perangkap lain adalah perangkap pertumbuhan ekonomi rendah. Artinya kalau

⁶ C. B. Lantieri, *ASEAN: Menjadikan Daerah Baru*, Jakarta: CSIS, 1997, hal. 160

tidak dapat ditemukan cara-cara ampuh untuk lepas dari dua perangkap ini, akan mustahil kondisi ekonomi-keuangan Indonesia berubah ke arah yang lebih baik. Tidak ada strategi yang lebih memberikan harapan kecuali dengan rasa percaya diri dan semangat kemandirian yang besar. Namun yang akan amat menarik adalah aspek politik pemerintahan SBY-Kalla yang dikhawatirkan sementara pengamat akan mudah “digoyang” di DPR oleh partai oposisi (koalisi kebangsaan) yang menguasai paling sedikit 307 kursi dari 550 kursi. Agar stabil pemerintahan SBY-Kalla harus selalu waspada pada kepentingan-kepentingan politik-ekonomi “koalisi kebangsaan”. “Ancaman” partai oposisi ini akan selalu merupakan “mimpi buruk” yang mengganggu setiap pengambilan keputusan politik penting dalam bidang ekonomi dan bidang-bidang lain. Jika pemerintahan SBY-Kalla akan memenuhi janjinya mengatasi kemiskinan dan pengangguran melalui kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat yang harus disubsidi, misalnya terhadap petani padi dan tebu yang sangat dirugikan oleh impor beras dan gula (baik yang legal maupun illegal), maka kebijakan subsidi ini, yang dianggap populistis, akan ditentang pengusaha yang tidak ingin tingkat upah meningkat karena ini menurut mereka, akan “menurunkan” daya saing industri kita. Inilah alasan “bisnis” pengusaha-pengusaha kita yang menghalangi upaya pewujudan keadilan sosial yang dicita-citakan ekonomi Pancasila.⁷

⁷ <http://www.Editorial.co.id>

kegiatan sosial yang akan dilaksanakan oleh perusahaan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan sosial yang akan dilaksanakan oleh perusahaan ini adalah sebagai berikut:

2. Kegiatan sosial yang akan dilaksanakan oleh perusahaan ini adalah sebagai berikut:

3. Kegiatan sosial yang akan dilaksanakan oleh perusahaan ini adalah sebagai berikut:

4. Kegiatan sosial yang akan dilaksanakan oleh perusahaan ini adalah sebagai berikut:

5. Kegiatan sosial yang akan dilaksanakan oleh perusahaan ini adalah sebagai berikut:

6. Kegiatan sosial yang akan dilaksanakan oleh perusahaan ini adalah sebagai berikut:

7. Kegiatan sosial yang akan dilaksanakan oleh perusahaan ini adalah sebagai berikut:

8. Kegiatan sosial yang akan dilaksanakan oleh perusahaan ini adalah sebagai berikut:

9. Kegiatan sosial yang akan dilaksanakan oleh perusahaan ini adalah sebagai berikut:

10. Kegiatan sosial yang akan dilaksanakan oleh perusahaan ini adalah sebagai berikut:

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Perdagangan internasional adalah salah satu dari persoalan ekonomi politik internasional yang paling tua dan paling kontroversial. Perdagangan internasional ditentukan oleh struktur produksi ekonomi politik internasional seperti halnya struktur teknologi dan struktur keamanan internasional. Perdagangan juga menghubungkan satu negara dengan negara lain sehingga meningkatkan saling ketergantungan diantara mereka.

Latar belakang munculnya perdagangan internasional adalah bahwa setiap negara tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan warganya, untuk itu mereka mendatangkan barang dari negara lain. Maka terjadilah transaksi barang atau jasa yang menghubungkan antara negara-negara dimana mereka saling membutuhkan.

Integrasi ekonomi pada umumnya dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan berbagai hambatan perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya diantara negara-negara yang tergabung dalam suatu ikatan kerja sama.⁴

Gagasan pembentukan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) muncul sebagai tanggapan dari perubahan yang terjadi diluar dan didalam ASEAN sendiri. Faktor eksternal yang menjadi penyebabnya adalah situasi usainya perang dingin, ambruknya sistem politik negara-negara komunis Eropa Timur yang disertai peralihan ekonomi mereka dari ekonomi terpimpin ke ekonomi pasar. Dilain

⁴ J. Soedrajat Djiwandono, *perdagangan dan pembangunan: Tantangan, Peluang dan Kebijakan* *Perdagangan Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: IDRES, 1992, hal 202

pihak timbul pula kecenderungan baru pembentukan blok-blok perdagangan dibelahan dunia seperti PTE (Pasar Tunggal Eropa) yang disusul kemudian oleh NAFTA (*North American Free Trade Agreement*). Selain itu muncul pula kawasan lain yang berpotensi menarik investasi asing seperti Cina yang tentu bakal menjadi saingan ASEAN secara keseluruhan.

Keputusan pembentukan AFTA merupakan sesuatu yang sangat tepat sekarang ini, terutama untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian dunia yang sedang terseret arus globalisasi dan regionalisasi perekonomian dunia, dan juga untuk memberikan “warna baru” kerjasama ekonomi ASEAN lebih rinci. Adanya Perkembangan dunia dengan pembentukan Pasar Tunggal Eropa dan NAFTA sungguh mengancam dan mengkhawatirkan negara ASEAN. Jika ASEAN tidak segera membentuk kesatuan ekonomi bersama, ditakutkan ASEAN makin tidak bisa bersaing.

AFTA diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi dan dapat lebih meningkatkan daya tarik ASEAN. Dengan menciptakan pasar yang lebih besar diharapkan bahwa ASEAN akan menarik lebih banyak penanam modal asing dan modal dari negara anggota ASEAN sendiri⁵. Bagi Indonesia AFTA bisa dijadikan latihan peningkatan daya saing sebelum mencapai persaingan pasar global. Kerjasama dibidang transportasi, komunikasi, perbankan, dan keuangan pada tingkat regional ASEAN akan memudahkan pengembangan

⁵ Raharjo Djambomo, *Sub Wilayah Ekonomi ASEAN dan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN*, Jakarta: Pusat Kerjasama Antara Negara ASEAN Sekretariat Darah, 1995, 1006 hal vii

Dengan kondisi perekonomian yang belum keluar dari krisis, disamping itu perekonomian Indonesia masih terdapat berbagai kelemahan-kelemahan, baik dari faktor internal ataupun eksternal, tentu saja membuat Indonesia semakin berat dalam menghadapi kerjasama AFTA. Realisasi AFTA dalam masa krisis lebih banyak menyimpan resiko dari pada memberikan kesempatan.

D. PERUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari penjelasan dan uraian di atas, maka dapatlah ditarik rumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimana strategi perdagangan nasional Indonesia pada masa pemerintahan SBY dalam menghadapi pasar bebas AFTA”?

E. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Untuk dapat menganalisa suatu permasalahan dibutuhkan suatu alat bantu berupa teori-teori yang dapat kita gunakan. Suatu teori dibutuhkan sebagai pegangan pokok secara umum agar penulisan ini mempunyai penjelasan yang logis, terdiri dari sekumpulan data yang tersusun dalam suatu pemikiran, yang terdiri dari berbagai fakta yang memiliki prinsip-prinsip yang membentuk dalil tertentu guna mengambil suatu hipotesa.

1. Konsep Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani “strategis” yang diartikan sebagai *the art of general*. Jauh sebelum abad ke-19 nampak bahwa kemenangan suatu bangsa banyak tergantung pada adanya pemimpin-pemimpin bangsa yang ulung

dan bijaksana. Antoine Hendri Jomini (1779-1869) dan Karl Von Clausewitz (1780-1831) adalah diantaranya yang merintis dan memulai mempelajari strategi secara ilmiah. Jomini memberikan pengertian yang bersifat deskriptif. Ia katakan bahwa strategi adalah seni menyelenggarakan perang di atas peta dan meliputi seluruh kawasan operasi, sedangkan Clausewitz memberikan rumusan bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran-pertempuran untuk kepentingan perang. Pengertian strategi yang terbatas pada militer dalam perang saja berlaku sampai abad ke 18.

Dalam abad modern sekarang ini, arti strategi telah meluas jauh dari arti semula menurut pengertian militer. Pengertian strategi tidak lagi terbatas pada konsep ataupun seni seorang panglima dimasa perang, tetapi sudah berkembang dan menjadi tanggung jawab seorang pimpinan. Dengan semakin kompleksnya perang dan masyarakat, strategi semakin harus diperhitungkan faktor-faktor non militer, seperti ekonomi, politik, psikologi, moral, dan teknologi. Dengan demikian strategi tidak saja merupakan konsep perang, tetapi juga telah menjadi unsur yang inheren dari kenegarawanan dalam waktu perang dan damai.

Pemilihan suatu strategi sungguh-sungguh didasarkan pada pertimbangan untung rugi dalam pencapaian suatu tujuan yang jelas. Umumnya perancangan strategi politik luar negeri tidak didasarkan pada pertimbangan moral, keyakinan atau hal-hal yang bersifat emosional. Juga perancangan strategi adalah tindakan yang penuh perhitungan, dan bukan tindakan untung-untungan. Seperti

... adalah ... strategi adalah ... langkah-langkah atau

moves atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya dalam suatu situasi kompetitif yang hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan.⁸

Sekarang ini, strategi telah menjadi seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan sumber daya nasional, termasuk kekuatan militer untuk “meraih” atau “mengamankan” kepentingan-kepentingan vital bangsa (tujuan-tujuan nasional). Kekuatan-kekuatan bangsa untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut disebut “strategi akbar” atau strategi nasional. Strategi merupakan seni, oleh karena penglihatan dan pengertian itu memerlukan intuisi, yang seakan-akan “merasa”, dimana ia sebaiknya menggunakan kekuatan-kekuatan yang tersedia dan bilamana ia sebaiknya melakukan itu.⁹

2. Konsep Kepentingan Nasional

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, Kepentingan Nasional adalah:

Politik Luar Negeri sebagai strategi atau bagian yang terencana dari tindakan yang dihasilkan oleh pembuat keputusan suatu Negara vis avis negara atau unit politik internasional yang lain bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional..”

⁸ Mochtar Mas'oed, *Studi Hubungan Internasional : Tingkat A*
Pusat antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gajah Mada, 19

(Foreign policy as strategy or planned course of action developed by the decision makers of state vis a vis other state or international entities aimed at achieving specific goals defined in terms of national interest..")¹⁰

Setiap negara yang berinteraksi dengan negara lain menggunakan Politik Luar Negeri sebagai sarana interaksi dan komunikasi senantiasa berlandaskan kepada kepentingan nasional masing-masing. Artinya, Politik Luar Negeri merupakan politik untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki.¹¹

Untuk mencapai tujuan nasional luar negeri, perlu dipertimbangkan juga kekuatan nasional yang dimiliki. Menurut Morgenthau, kekuatan nasional meliputi : geografi, sumber daya alam, kemampuan industri, kesiagaan militer, penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi dan kualitas pemerintah.¹²

Begitu juga halnya Indonesia, politik luar negeri pada hakekatnya merupakan sikap dan tindakan yang sesuai dengan perumusan mengenai dasar dan tujuan nasional dalam rangka hubungan internasional. Karena itu politik luar negeri pada umumnya merupakan konsep nasional yang mengandung tinjauan nasional dan global yang berlandaskan kepentingan dan cita-cita nasional suatu

¹⁰ Jack C. Plano and Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, Holt, Rinehart & Winston, USA, 1967, hal.127.

¹¹ Sufri Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988, hal.10.

¹² H.J. Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, direvisi oleh Kenneth W. Thomson, ed. VI, buku I, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1990, hal.170-218.

bangsa. Dengan demikian setiap kebijaksanaan politik luar negeri merupakan refleksi dari kepentingan nasional.

Adapun visi Departemen Luar Negeri Indonesia adalah “Terdepan dalam diplomasi untuk mewujudkan kepentingan nasional”. Visi ini menempatkan Departemen Luar Negeri sebagai pelaku utama politik dan hubungan luar negeri, yang bersama potensi nasional lain, diabdikan untuk meraih dan mewujudkan tujuan nasional Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai penyelenggara utama diplomasi Indonesia. Departemen Luar Negeri Indonesia mempunyai misi:

- a) Memajukan hubungan persahabatan dan kerjasama dengan negara-negara dan organisasi-organisasi regional/internasional.
- b) Melindungi warga negara Indonesia di luar negeri.
- c) Memberikan kontribusi pada upaya menciptakan ketertiban dunia yang damai, adil, dan sejahtera.
- d) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta perorangan dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri.
- e) Menjamin kesiapan diplomasi Pemerintah Indonesia.

Kebijaksanaan Politik Luar Negeri pada hakekatnya adalah serangkaian kebijaksanaan nasional suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya yang dilaksanakan diluar batas yurisdiksi nasional negara tersebut

Bagi Indonesia, untuk mencapai tujuan nasionalnya, serangkaian kebijaksanaan nasional terangkum didalam pola-pola umum pembangunan nasional yang merupakan rangkaian dari program-program yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan berlangsung secara terus-menerus yang terangkum didalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Rangkaian program-program pembangunan yang terus-menerus tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang termaktub di dalam pembukaan UUD 45, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian pernyataan diatas mewajibkan pemerintah untuk:

- i. Tugas kedalam, melindungi bangsa dan tanah air Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- ii. Tugas ke luar, untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa.¹³

Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa kepentingan nasional bersumber dari seluruh nilai yang digeneralisasikan pada keseluruhan kondisi yang dihadapi oleh suatu negara terhadap negara lain. Kepentingan nasional juga merupakan faktor penting bagi setiap negara dalam melaksanakan politik luar negeri suatu

negara, dimana ia tidak hanya menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan bagi pertimbangan strategi untuk menghadapi adanya ancaman tetapi juga akan menentukan pilihan skala prioritas politik luar negeri suatu negara.¹⁴

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian kajian ilmu ekonomi internasional yang menitik beratkan pada transaksi-transaksi riil antar penduduk suatu Negara dengan Negara lain. Transaksi riil ini antara lain meliputi pergerakan barang secara fisik atau suatu komitmen atas sumber daya ekonomi yang tampak (*a tangible commitment of economic resource*).¹⁵

Dewasa ini, dunia ditandai dengan adanya era globalisasi dan regionalisasi, dua kepentingan dan kenyataan yang berbeda sekaligus tidak bisa terelakkan. Dengan adanya suatu tujuan dari suatu negara tertentu maka akan memperkuat *bargaining position* dalam menghadapi raksasa regionalisasi ekonomi. Pengertian globalisasi sendiri adalah tidak ada satu negara atau kelompok negara yang dapat lepas dari perkembangan menuju saling ketergantungan ekonomi yang semakin besar. Sedang regionalisasi dalam pengertian AFTA adalah negara terlebih yang memiliki arti penting karena letaknya yang strategis atau kekayaan alamnya, akan mempunyai kesempatan yang lebih baik dalam menghadapi tekanan-tekanan dari negara besar bila mereka berada dalam pengelompokan.

¹⁴ Dahlan Nasution, *Konsep Politik Internasional*, Jakarta, Bina Cipta, 1983, hal.32.

¹⁵ Paul B. Kenen dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan*, Bandung:

Oleh karena itulah, dalam pelaksanaan perdagangan internasional, sudah sewajarnya setiap negara mempunyai suatu strategi untuk kepentingan nasionalnya dan demi tercapainya tujuan dan cita-cita nasional. Strategi perdagangan nasional merupakan suatu kebijakan atau keputusan pemerintah dibidang ekonomi perdagangan internasional yang mengandung unsur “tepat guna”. Artinya bahwa semua kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia harus tepat dan akurat untuk mengoptimalisasikan manfaat perdagangan internasional bagi pembangunan nasional Indonesia.

F. HIPOTESA

Berangkat dari perumusan masalah dan teori diatas, maka dapat ditarik hipotesa sebagai berikut: Strategi ekonomi Indonesia dibawah pemerintahan SBY dalam menghadapi perdagangan bebas AFTA untuk mensejahterakan kehidupan bangsa dan meningkatkan perekonomian Indonesia yaitu dengan melakukan serangkaian penyesuaian strategi ekonomi-politik dalam negeri berupa : (1) Promosi dan penetrasi pasar, (2) Peningkatan efisiensi produksi dalam negeri, (3) Perlindungan terhadap industri kecil, (4) Peningkatan kualitas sumber daya

G. JANGKAUAN PENULISAN

Tanpa pembatasan masalah dalam suatu penulisan ilmiah dapat menggelincirkan pokok bahasan menjadi meluas. Oleh sebab itu diperlukan batasan dengan mengadakan jangkauan penulisan.

Berdasarkan hal diatas, penulis perlu membatasi tulisan tentang regionalisasi AFTA hanya pada partisipasi Indonesia yang dilihat dari segi strategi ekonomi-politik Indonesia dalam menghadapi kerjasama AFTA pada masa pemerintahan SBY sekarang. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada data yang diambil sebelum tahun tersebut untuk mendukung penulisan.

H. METODE PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan kerangka teori kemudian ditarik suatu hipotesa yang selanjutnya akan dibuktikan melalui data empiris. Pengumpulan data ini akan dilakukan melalui studi pustaka. Oleh karena itu data yang akan diolah merupakan data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, majalah-majalah, surat kabar, maupun dokumen dan laporan-laporan resmi baik yang diterbitkan atau tidak, serta sumber-sumber lain yang dapat dijadikan acuan dan membantu bahan dalam

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna memudahkan dalam pembahasan, penulisan dan pemahaman terhadap pemikiran yang ingin penulis tuangkan dalam tulisan ini maka sangat perlu kami buat sistematika penulisan yang telah kami rencanakan sebagai berikut:

- Bab I** Pokok bahasan mengenai pendahuluan dengan sub pokok bahasan diantaranya, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.
- Bab II** Dalam bab ini penulis memberi bahasan mengenai AFTA, gambaran umum negara-negara AFTA, peluang dan tantangan AFTA bagi Indonesia, dan peran sertanya Indonesia dalam ASEAN dan AFTA.
- Bab III** Bab ini berisikan tentang kondisi riil perekonomian Indonesia dimana saat ini Indonesia sedang berusaha untuk memulihkan perekonomiannya dari krisis moneter yang telah melanda Indonesia dan sebagian negara anggota ASEAN. Didalam bab ini juga berisi mengenai kekuatan dan kelemahan ekonomi Indonesia, serta faktor-faktor kekurangsiapan Indonesia menghadapi AFTA.
- Bab IV** Menjelaskan strategi ekonomi dan politik SBY dalam menghadapi pasar bebas AFTA.
- Bab V** Akan menyajikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan